



SUAP PERIZINAN DI KOTA YOGYA GM Sebuah Hotel Turut Jadi Saksi

JAKARTA (KR) - Penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta terus dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil empat saksi. Para saksi yang dipanggil, menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, diperiksa untuk tersangka mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) dan kawan-kawan.

"Hari ini (Senin kemarin), KPK melakukan pemeriksaan saksi atas tindak pidana korupsi dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemkot Yogyakarta untuk tersangka HS dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan," jelas Ali Fikri di Jakarta, Senin (12/9).

Mengenai empat saksi tersebut adalah General Manager (GM) Hotel Pesonna Malioboro Joko Suparno Widiyanto dan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Joko Budi Prasetyo. Sedangkan, dua saksi lain dari pihak swasta masing-masing Tomy Galih Prasetyo alias Tomy Sudjiro dan Daniel Feriyanto.

Diungkapkan Fikri, dalam perkara ini KPK telah menetapkan HS bersama dua orang lainnya sebagai tersangka atas dugaan menerima suap yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta

Nurwidhiartana (NWH) dan Triyanto Budi Yuwono (TBY), sekretaris pribadi merangkap ajudan HS.

Sementara, untuk tersangka yang diduga sebagai pemberi suap ialah Oon Nusihono (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk. Saat ini uang bersangkutan sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogyakarta.

KPK sebelumnya memaparkan konstruksi perkara, pada tahun 2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA, mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta.

Permohonan izin berlanjut di 2021, di mana ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta membuat kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022. Dalam hal ini KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS. **(Ful)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005